

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN
INFLASI DI KABUPATEN TAKALAR**

SUARDI ACHMAD

Nomor Induk Mahasiswa : 1056 10474 013



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKSSAR**

2021

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN
INFLASI DI KABUPATEN TAKALAR**



Kepada

25/05/2021

1 ep
Smb. Alumni

R/ 0087/ADN/2108

ACH

p^o

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan
Inflasi di Kabupaten Takalar
Nama Mahasiswa : Suardi Achmad
Nomor Stambuk : 10561 04474 013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II


Dr. H. Muhammadiyah, M.M.


Riska Sari, S.Sos., M.AP.

Mengetahui,


Dekan Ketua Program Studi



Dr. Hj. Hayani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0160/FSP/A.4-II/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Februari tahun 2021


Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Muhammadiyah, M.M (Ketua)
2. Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si.
3. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP


()

()

()

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Suardi Achmad
Nomor Induk : 1056 10474 013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 08 Februari 2021

Yang Menyatakan


Suardi Achmad

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan motivator dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Takalar. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator telah melakukan berbagai Tindakan dalam perumusan kebijakan tersebut seperti, melakukan upaya untuk memperkuat logistik, melakukan koordinasi dengan tim pengendali inflasi provinsi dan pusat, peran pemerintah sebagai fasilitator pemerintah telah memfasilitasi masyarakat berupa harga sembako murah dan ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu meskipun belum merata, peran pemerintah sebagai motivator proses pemberian motivasi kepada para pelaku ekonomi pemerintah daerah mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk memberikan orientasi tugas kepada TPID dalam hal pengendalian inflasi, dan pemerintah siap memberikan penghargaan berupa pemberian piagam dan dana insentif

Kata Kunci : Peran pemerintah, mengendalikan inflasi

ABSTRACT

This study purposed to find out the role of the government as a regulator, facilitator, and motivator in controlling inflation in Takalar Regency. The informants in this study amounted to 4 people. This study used a qualitative research type with a qualitative descriptive method. Data collection techniques consisted of observation, interviews and documentation. The results showed that the role of the government as a regulator had taken various actions in the formulation of these policies, such as making efforts to strengthen logistics, coordinating with provincial and central inflation control teams, the government's role as facilitator of the government had facilitated the community in the form of cheap basic food prices and this was very helpful. The underprivileged community, although not evenly distributed, the role of the government as a motivator for the process of providing motivation to economic actors of the local government provided training and guidance to provide task orientation to TPID in terms of controlling inflation, and the government was ready to provide awards in the form of awarding certificates and incentive funds

Keywords: *The role of government, controlling inflation*



KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala skripsi yang berjudul **“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Inflasi Di Kabupaten Takalar”**. Skripsi yang penulis buat bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Satu penghargaan tertinggi penulis berikan pada Ayah dan Ibu tercinta yang dengan ketulusan hati dan segenap pengorbanannya serta kasih sayang kepada penulis serta menjadi tulang-tulang penguat penulis dalam menghadapi begitu banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak masukan, bimbingan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H.Ambo Asse, M.Ag** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. **Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. **Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. **Bapak Dr. H. Muhammadiyah, MM** selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. **Ibu Riska Sari, S.Sos, M.AP** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas ilmunya yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staff pegawai/administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas pelayanannya selama ini.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis pesembahkan buat saudara dan saudariku telah memberikan motivasi, do'a. bantuan serta dorongan sehingga cita-cita penulis dapat terwujud.
8. Serta seluruh teman-teman, keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga mampu berada pada tahap ini.

Semoga segala bantuan, do'a dan motivasinya dinilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul khairat, Wassalamualaikum W.r W.b

Makassar, 08 Februari 2021



Suardi Achmad

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| B. Konsep Peran Pemerintah..... | 13 |
| C. Inflasi..... | 19 |
| D. Kerangka Fikir..... | 23 |
| E. Fokus Penelitian..... | 24 |
| F. Deskripsi Fokus Penelitian..... | 24 |
| BAB III. METODE PENELITIAN..... | 27 |
| A. Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 27 |
| B. Jenis Dan Tipe Penelitian..... | 27 |
| C. Sumber Data..... | 28 |
| D. Informan Penelitaian..... | 28 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 29 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 29 |
| G. Pengabsahan Data..... | 30 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 33 |
| A. Gambaran Umum..... | 33 |
| B. Hasil Penelitian..... | 56 |
| C. Pembahasan..... | 63 |
| | |
| BAB V. PENUTUP..... | 65 |
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran..... | 66 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Informan Penelitian..... | 28 |
| Tabel 2. Daftar Kecamatan di Kabupaten Takalar..... | 36 |
| Tabel 3. Tingkat inflasi kabupaten takalar pada tahun 2019 dan 2020 | 57 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir | 24 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Takalar | 38 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Menurut Boediono (2012), pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, antara lain terciptanya lapangan pekerjaan, mendorong peningkatan pendapatan Nasional, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya indeks pembangunan manusia dan memperkuat posisi negara di mata internasional.

Menurut Budiono, (2012), Secara teori ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik dari sisi fiskal maupun moneter. Jika dilihat dari sektor moneter, Bank Sentral Republik Indonesia selaku pemegang otoritas moneter di Indonesia memiliki andil yang besar dalam penentuan kebijakan – kebijakan moneter yang akan diimplementasikan. Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro.

Kebijakan moneter tersebut merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter, seperti jumlah uang beredar, uang primer, dan kredit perbankan, serta suku bunga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Variabel – variabel yang terlibat dalam kebijakan moneter itu sendiri memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan besar kemungkinan terjadi *trade off* dalam perealisasiannya.

Dalam penerapannya, perkembangan ekonomi yang diharapkan yakni terjaganya stabilitas makro seperti peningkatan *output rill* yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya dalam pengendalian inflasi, Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Takalar mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai Regulator, Fasilitator dan Motivator.

Peran pemerintah sebagai Regulator yang mengatur dan mengelolah perekonomian yang ada di Kabupaten Takalar guna mengendalikan inflasi sebagai arah untuk menyelenggarakan serta menyeimbangkan sistem perekonomian yang ada di Kabupaten Takalar/Pemerintah Kabupaten Takalar mengacu pada Kepres No. 23 Tahun 2017 pasal 5 yang berbunyi : melakukan koordinasi dengan Tim pengendalian inflasi pusat dan melakukan langkah – langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang meningkatkan sistem kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Takalar mengenai tata kelola keuangan guna pengendalian Inflasi di kabupaten tersebut.

Dalam hal fasilitator pemerintah Kabupaten Takalar merupakan fasilitator yang menciptakan hal yang kondusif bagi beberapa pelaksanaan diantaranya pengendalian inflasi. Peran ini sangat penting dalam hal pengendalian inflasi yang terjadi di Kabupaten Takalar. Namun pemerintah daerah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat setempat yang salah satunya pelatihan dalam hal pengenalan inflasi yang dilaksanakan oleh TPID Kabupaten Takalar. Ratminto dan Atik Septi, (2012).

Jika dilihat fakta yang terjadi dilapangan, peran pemerintah Kabupaten Takalar sebagai motivator memiliki kepedulian terhadap pembangunan perekonomian daerah. Hal ini cukup beralasan karena motivator (kader pemberdayaan masyarakat) telah memiliki beberapa pengetahuan, kemampuan, serta dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam beberapa pembekalan berupa pelatihan dalam hal pengendalian inflasi yang terjadi di Kabupaten Takalar. Hardiyansyah, (2012).

Stabilitas harga atau yang kerap kali disebut inflasi merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi penyaluran kredit. Angka inflasi sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi makro kerap kali menjadi pusat perhatian bagi para pengamat ekonomi secara khusus dan masyarakat secara umum.

Turun naiknya angka inflasi setidaknya menjadi cerminan gejala perekonomian di suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi tentu menjadi hal yang sangat merugikan bagi perekonomian suatu negara. Berbagai penelitian membuktikan bahwa di negara-negara dunia ketiga, keadaan ekonomi yang buruk dan cenderung kurang menguntungkan telah memacu tingkat inflasi yang

tinggi, yang pada gilirannya akan menjadi malapetaka bagi masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Jika hal tersebut terjadi maka penyaluran kredit akan terganggu dikarenakan keengganan masyarakat untuk memperoleh kredit investasi untuk melakukan hal – hal produktif yang membantu pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang baik juga dapat dilihat dari tingkat pengangguran yang terus menurun, artinya semakin banyak lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakatnya. Jika hal tersebut terjadi, maka masyarakat di suatu negara tersebut akan mengalami kesejahteraan dimana tercukupinya segala kebutuhan baik dari kebutuhan sekunder, primer, dan tersier. Pertumbuhan industri juga akan berkembang pesat sehingga memungkinkan jika negara tersebut dapat menjadi negara maju. Suprpto, (2011).

Sebaliknya, jika suatu negara tidak memiliki perekonomian yang baik, maka dampak yang tidak bisa dihindari salah satunya yaitu inflasi. Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang sering dialami suatu negara, khususnya Indonesia. Inflasi adalah penyakit ekonomi yang tidak bisa diabaikan, karena dampak yang ditimbulkan pada perekonomian bisa berakibat pada ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat serta pengangguran yang tinggi.

Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih

cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan Upah Minimum Regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan. (Sumber: Tribun Timur 2018).

Inflasi pada umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Akan tetapi, sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada *trade off* antara inflasi dan pengangguran menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara, dan sebagainya.

Dampak negatif inflasi di pasaran, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga pasar, sehingga harga akan terus meningkat. Bila harga barang secara umum naik secara terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang kemudian memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap

segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna untuk membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di *rush*, akibatnya bank kekurangan dana dan berpotensi tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia. <https://www.kompasiana.com/cpnssmd/5bdc0f4312ae9462ed34b443/perlunya-reformasi-pelayanan-publik?page=all>.

Namun, jika inflasi terjadi secara berkepanjangan, maka produsen banyak yang akan mengalami kebangkrutan karena produknya yang relatif mahal sehingga tidak ada yang akan mampu membeli. Pendistribusian barang juga akan relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang. Hasilnya, jurang kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata dan mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan. Sedangkan dampak positifnya, inflasi lebih menguntungkan bagi pengusaha barang-barang mewah (*high end*) yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi masalah (*prestise*).

Produksi barang-barang bertambah, karena keuntungan pengusaha bertambah. Kesempatan kerja akan bertambah, karena terjadi tambahan investasi hal ini terjadi karena perusahaan memproduksi dan mengedarkan barang lebih banyak. Masyarakat juga akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan dan kesadaran untuk menabung masyarakat akan meningkat karena masyarakat akan

lebih menghargai uang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya. Iwan Satibi, (2012).

Untuk mengendalikan inflasi, peran pemerintah merupakan kunci dalam membuat kebijakan menstabilkan ekonomi. Indonesia pernah mengalami kemerosotan ekonomi moneter pada tahun 1997-1998 ketika itu merupakan masa yang paling sulit yang pernah dialami oleh Indonesia karena ketidakstabilan dan pengangguran yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang semakin lambat.

Pemerintah menjaga inflasi agar tetap stabil melalui kebijakan moneter. Mekanisme pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia dilakukan melalui pengendalian jumlah uang beredar dengan menetapkan tingkat suku bunga. Misalnya, pemerintah ingin menurunkan permintaan, hal ini dilakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga.

Dalam hal ini Pemerintah Kab. Takalar yang berusaha mengendalikan inflasi berdasarkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Untuk menjaga dan mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta, Arsyad. (2019).

Seperti halnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Takalar yang melakukan beberapa pelatihan dalam hal pengendalian inflasi yang jumlah pesertanya 40 orang dari berbagai instansi yang terkait. Pengendalian inflasi ini dikarenakan ketersediaan stok pangan yang harus meningkatkan produksi pertanian di daerah Kabupaten Takalar khususnya kebutuhan akan

pangan dan hasil pertanian masyarakat yang akan didistribusikan dari sentra produksi pasar sehingga pendapatan petani bertambah namun stabilitas harga harus dijaga serta kebutuhan masyarakat harus terpenuhi. (<http://humassetda.takalarkab.go.id/index.php/compenent/k2/item/1597-sekda-buka-pelatihan-fasilitas-penguatan-dan-pengawasan-tpid>).

Adapun permasalahan pada pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal mengenai pengendalian inflasi masih kurangnya Kerjasama dan komitmen antara seluruh pelaku ekonomi baik dari pihak Pemerintah maupun dari Swasta yang seharusnya untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti mengangkat judul "*Peran Pemerintah Dalam Mengendalikan Inflasi Di Kabupaten Takalar*".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah sebagai regulator, dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Takalar?
2. Bagaimanakah peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Takalar?
3. Bagaimanakah peran pemerintah sebagai motivator dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah sebagai regulator dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Takalar.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah sebagai motivator dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka pengembangan ilmu komunikasi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat di harapkan memberikan masukan terhadap Pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Takalar.
3. Secara metodologis; hasil dari penelitian ini diharapkan pula menjadi kajian dalam hal pengembangan riset dan mereka yang akan melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi saya adalah sebagai berikut:

1. Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh (2018) Dengan Judul: Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (Opm) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Perindag Diy). Kestabilan harga barang terutama harga barang-barang pokok terbukti mampu menjaga stabilitas kondisi politik. Masyarakat cenderung lebih tenang karena kebutuhan pokoknya terpenuhi dengan baik sehingga stabilitas negara tetap terjaga. Peran Kementerian Perdagangan sangat penting dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil. Kestabilan harga juga mencerminkan kondisi psikologi masyarakat karena *panic buying* oleh masyarakat mungkin terjadi. Kurangnya informasi dan persepsi negatif masyarakat menjadi penyebab *panic buying* secara serempak. Kestabilan harga sebagai resultan dari berbagai usaha yang telah dilakukan secara sinergis dan harmonis oleh pemerintah dan masyarakat. Kerja sama dan koordinasi Kemendag dengan Bulog, Kepolisian RI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lembaga lain memiliki peran yang penting. Tidak hanya menjaga stabilisasi harga, Operasi Pasar Murni (OPM) juga bertujuan untuk menjaga pasokan barang

komoditas disetiap pasar apabila terjadi pergerakan harga yang terjadi baik seperti adanya inflasi atau memasuki hari-hari besar di Indonesia yang mengakibatkan harga disetiap pasar melonjak dengan cepat. Selain itu, Operasi Pasar Murni (OPM) juga bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang berkehidupan dibawah standar kelayakan, karena Operasi Pasar tersebut menjual barang komoditas yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harga barang tersebut dibawah harga pasar yang ada. Tujuan penelitian ini untuk melihat kendala pemerintah dalam menjaga stabilitas harga operasi pasar murni (OPM). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian mendapati bahwa kendala dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga kestabilan harga murni pasar yang ada dikota Yogyakarta. Adapun pemerintah yang terkait dalam penelitian ini adalah Dinas perindustrian dan perdagangan kota Yogyakarta.

2. Meda Fitria (2018) Dengan Judul: Manajemen Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Tpid) Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Mengendalikan Inflasi Di Kota Palangka Raya. Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap shocks tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama koordinasi lintas inflasi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat. Inflasi adalah suatu kondisi atau keadaan

terjadinya kenaikan harga untuk semua barang secara terus-menerus yang berlaku pada suatu perekonomian tertentu.²⁵ Apabila terjadi kenaikan harga pada satu atau dua jenis barang, belum atau tidak dapat dikatakan inflasi. Demikian juga apabila kenaikan harga barang terjadi dalam waktu sangat singkat, misalnya kenaikan secara musiman menjelang hari raya lebaran, tahun baru dan lain sebagainya, belum dapat dikatakan inflasi karena setelah peristiwa hari raya tersebut, harga barang-barang turun kembali menjadi normal. Jadi kenaikan harga-harga tersebut tidak berlangsung secara terus-menerus dan segera berakhir, sehingga tidak memerlukan kebijakan moneter atau kebijakan ekonomi secara khusus untuk menanggulangnya. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makro ekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga dan bahkan distribusi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dari Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Tpid) Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Mengendalikan Inflasi Di Kota Palangka Raya. Dari hasil penelitian tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja tim pengendalian inflasi daerah, khusus di kota Palangka Raya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana menggunakan metode wawancara dan observasi dengan pihak-pihak terkait.

3. Ayu Anastavia (2018), Dengan judul: Pengaruh Inflasi Terhadap Kestabilan Dan Eksistensi Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus Usaha

Keripik Pisang Tunas Kota Metro). Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makro ekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilitas dana lewat lembaga keuangan formal. Definisi inflasi itu sendiri adalah kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian.³ Inflasi ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan dan kenaikan biaya produksi yang selanjutnya berakibat pada naiknya harga jual barang-barang dan jasa. Sehubungan dengan kestabilan dan eksistensi usaha dengan adanya permasalahan inflasi tersebut, maka pemilik usaha keripik pisang tunas mengatakan bawasannya usaha yang beliau miliki mengalami penurunan omset karena adanya kenaikan harga barang pokok yang tidak stabil. Adapun metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana inflasi sangat berpengaruh terhadap kestabilan harga yang ada dalam ukm-ukm dikota metro.

B. Konsep peran Pemerintah

1. Definisi peran

Definisi peran menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (2012) diartikan sebagai pemain sandiwara (film), pelawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Soejono, (2012), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Adapun Jenis-Jenis peran menurut Soekanto (2012) yaitu:

- a) Peran Aktif merupakan sebuah peran yang dilakukan sebuah orang secara absolut atau selalu aktif dalam sebuah tindakannya yang mereka lakukan di dalam organisasi atau sebuah lembaga social yang mereka miliki. Keaktifan ini sendiri dapat diukur dengan melalui bentuk kehadiran.
- b) Peran Partisipasif yaitu sebuah peran yang dilakukan hanya berdasar pada jangka waktu tertentu. Definisi ini sangat berlawanan sekali dengan peran aktif, karena biasanya kondisi peran partisipasif dapat dilakukan dengan wacana objek bukan sebuah subjek.

c) Peran Pasif yaitu peran yang tidak dilakukan dan mengindikasikan bahwa peran yang digunakan sebagai sebuah simbol terhadap keadaan tertentu ada di dalam suatu kehidupan masyarakat. Jenis atau pengelompokan peran yang sudah dikemukakan dan sudah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2012), yang mengklarifikasikan peran dengan sangat jelas berdasarkan pada kriteria tertentu.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012).

Menurut Mintzberg (Siswanto, 2012), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

- a. Peran Antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini.
- b. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal

mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini.

- c. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sisitem pembuatan strategi organisasinya.

Apabila seseorang dapat melaksanakan suatu hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya dia sudah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan mempunyai perbedaan hanya untuk kepentingan sebuah ilmu pengetahuan tersebut. Kedua hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan karena saling tergantung pada yang lain begitu pula sebaliknya.

1. Jenis-jenis peran

Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut, Soekanto (2012) yaitu;

- a. Peran dapat pula meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini yaitu merupakan rangkaian sebuah peraturan yang dapat membimbing seseorang dalam hal kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan sebuah konsep tentang apa yang bisa dilakukan oleh sebuah individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat pula dikatakan sebagai sebuah perilaku individu tertentu yang sangat penting terhadap struktur sosial dalam masyarakat. Sejumlah

peran sering disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang karena telah menduduki sebuah status-status sosial khusus.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu sikap atau sebuah perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sebuah kelompok orang terhadap seseorang yang memiliki sebuah status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas, dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan peran pemerintah, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas yang terkait.

Dapat pula diartikan bahwa suatu peran merupakan sebuah tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh sebuah masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

Menurut Dewi Wulansari (2012), peran merupakan konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh sebuah individu dalam masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi sebuah struktur sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, kata dasar pemerintahan adalah perintah, memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki

wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. sehingga antara pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.

Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud Yusuf (2014) antara lain:

a. Pemerintah sebagai regulator

Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai motivator

Peran pemerintah sebagai motivator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan

peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau pemodalannya kepada masyarakat yang diberdayakan.

C. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara dimana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang (*continue*) disebabkan karena tidak seimbangannya arus uang dan barang. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi, misalnya kenaikan harga-harga menjelang hari raya Idul Fitri. Pada umumnya inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dari pada yang dibutuhkan. Inflasi adalah gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan biasanya hanya sebatas pengendalian inflasi saja. Sugiyono, (2014).

Julius R. Latumaerissa (2011) definisi singkat dari inflasi ialah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus menerus. Selain terjadi secara terus menerus, kenaikan harga bisa disebut dengan inflasi apabila kenaikan harga tersebut mencakup keseluruhan jenis barang.

Sesuai dengan pernyataan dari Mankiw N. Gregory, Euston Quah dan Peter Wilson (2012) inflasi ialah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Inflasi tidak terjadi begitu saja, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya inflasi di suatu negara. Beberapa sebab yang dapat menimbulkan inflasi antara lain pemerintah terlalu berambisi untuk menyerap sumber-sumber ekonomi lebih besar daripada sumber-sumber ekonomi yang dapat dilepaskan

oleh pihak bukan pemerintah pada tingkat harga yang berlaku berbagai golongan dalam masyarakat berusaha memperoleh tambahan pendapatan relatif lebih besar daripada kenaikan produktifitas mereka.

1. Macam – macam inflasi

Terdapat beberapa macam inflasi yang dapat terjadi dalam perekonomian, baik berdasarkan parah atau tidaknya suatu inflasi dan didasarkan pada sebab-sebab awal terjadinya inflasi. Menurut Latumaerissa (2011) inflasi dapat dikelompokkan dalam beberapa golongan jika didasarkan atas parah tidaknya suatu inflasi, sebagai berikut:

- a. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10%-30% setahun)
- c. Inflasi berat (antara 30%-100% setahun)
- d. Hiperinflasi (diatas 100%)

Parah tidaknya suatu inflasi dapat diukur dengan suatu indikator yang dapat dihitung sehingga dapat ditentukan, inflasi yang terjadi termasuk pada inflasi yang ringan, sedang, berat atau bahkan hiperinflasi. Ukuran inflasi yang paling banyak digunakan ialah indek harga konsumen (IHK) yang juga dikenal dengan *consumer price index* (CPI).

2. Penyebab Terjadinya Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa hal jika didasarkan pada sebab-sebab awalnya. Pertama, inflasi yang timbul dikarenakan permintaan masyarakat yang kuat, kenaikan harga produk akhir mendahului kenaikan

harga input yang disebut dengan *demand pull inflation*. Kedua, inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi, sebaliknya dari *demand pull inflation*, harga input mendahului kenaikan harga produk akhir. Pada umumnya, inflasi yang terjadi diberbagai negara di dunia ialah kombinasi dari kedua macam inflasi tersebut dan sering kali keduanya memperkuat satu sama lain. Mankiw N. Gregory, Euston Quah dan Peter Wilson (2012).

Jika didasarkan pada asas inflasi yang dibedakan menjadi *domestic inflation* dan *imported inflation*, *domestic inflation* ialah inflasi yang berasal dari dalam negeri, sedangkan *imported inflation* ialah inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal, dsb. Inflasi yang berasal dari luar negeri ialah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang negara kita.

Kenaikan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor, secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi (yang akan diikuti kenaikan harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor (*cost inflation*); dan secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan (tetapi tidak harus demikian) kenaikan harga barang-barang

impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/ swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan impor tersebut (*demand inflation*). Latumaerissa (2011).

3. Indikator Inflasi

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang di gunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu (Prathama, 2012).

Diantaranya yaitu:

a. Indeks Harga Konsumen (*consumer price index* atau *CPI*).

Indeks harga konsumen atau disingkat IHK adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus di beli konsumen dalam satu periode tertentu. Dalam indeks harga konsumen, setiap jenis barang di tentukan suatu timbangan atau bobot tetap yang proporsional terhadap kepentingan relative dalam anggaran pengeluaran konsumen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (*wholesale price index*).

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka indeks perdangan besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (*producer price index*) IHPB menunjukan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

c. indeks harga implicit (*GNP Deflator*)

indeks harga implisit adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atoratio antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan

100. GNP Riil adalah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian, yang diperoleh Ketika output dinilai dengan menggunakan tahun dasar.

d. alternative dari indeks harga implisit

Mungkin saja terjadi, pada saat ingin menghitung inflasi dengan menggunakan IHI tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data IHI. Hal ini dapat diatasi. Sebab prinsip-prinsip dasar penghitungan infalsi berdasarkan deflator PDB adalah membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil. Selisih keduanya merupakan tingkat inflasi.

D. Kerangka Fikir

Adapun peran pemerintah Kabupaten Takalar dalam mengendalikan inflasi yaitu tiga langkah strategis yang disepakati untuk menjaga inflasi 2019 tetap berada dalam kisaran sasarannya yakni pertama, menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, terutama ditopang pengendalian inflasi *volatile food* maksimal di kisaran 4-5 persen. Peran pemerintah Kabupaten Takalar ini dilakukan melalui empat kebijakan utama (4K) terkait Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Arsyad (2019).

Di dalam sebuah pemerintahan untuk mengendalikan inflasi, perlu adanya peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan motivator.

Bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian adalah peran pemerintah mengendalikan inflasi yang terjadi di Kabupaten Takalar. Pengendalian inflasi ini merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Takalar yang saat ini terus menekan angka inflasi. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah peran pemerintah sebagai; Regulator, Fasilitator, dan Motivator.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Regulator

Regulator adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merumuskan aturan-aturan atau kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian inflasi yang ada di Kabupaten Takalar antara lain yaitu:

- a. Pemerintah daerah sebagai pembuat peraturan dan merupakan dasar regulasinya sesuai SK Bupati NO. 395/Thn
- b. 2020 dalam hal mengendalikan inflasi yang terjadi di Kabupaten Takalar.
- c. Instrumen merupakan pengadaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan alat atau sarana oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas seperti membuat peraturan perundang undangan dan kebijakan atau perda Kabupaten Takalar.

2. Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan seperti dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah). Kabupaten Takalar yang melakukan pelatihan dalam hal mengendalikan Inflasi. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Takalar menjembatangi beberapa kepentingan masyarakat dalam hal mengoptimalkan beberapa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar tersebut antara lain:

- a. Pelatihan adalah cara yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Takalar untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di Kabupaten tersebut.
- b. Pendanaan merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Takalar untuk melatih SDM dan melengkapi fasilitas demi melakukan pelatihan kepada tim TPID dalam hal pengendalian inflasi.

3. Motivator

Peran pemerintah sebagai motivator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengendalian perkonomian di Kabupaten Takalar diantaranya bimbingan merupakan memberikan orientasi tugas kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Orientasi ini bertujuan dalam hal mengendalikan inflasi yang terjadi di Kabupaten Takalar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu

Waktu yang dibutuhkan selama 2 Bulan dimulai setelah ujian proposal dan mendapat surat izin meneliti dari LP3M.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian di Kantor Dinas Perdagangan Kab. Takalar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kejadian yang sebenarnya dari lokasi yang diteliti atau penelitian yang dilakukan sehingga dapat mempermudah bagi penulis memperoleh data yang objektif dalam rangka mengetahui seperti apa peran pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Takalar.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe studi kasus yaitu untuk memberikan gambaran kasus tentang bagaimana peran pemerintah Kabupaten Takalar selama ini dalam mengendalikan inflasi yang terjadi.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dengan melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung dilokasi yang menjadi objek penelitian dan wawancara langsung secara terbuka sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara.

2. Data skunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis memakai buku-buku yang berkaitan dengan peran pemerintah.

D. Informan Penelitian

Adapun informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 1. Informan

| No | Nama Informan | Inisial | Jabatan |
|----|-------------------------------|---------|--|
| 1 | H. Basri Sulaiman, SE, MM. | Bs | Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan |
| 2 | Mustari, S.Sos, M.Si | Ms | Sekretaris Dinas perindustrian dan perdagangan |
| 3 | Hasyim | Hm | Kepala Sub Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Takalar |

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan bagi peneliti, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Adalah pengamatan data yang dilakukan melalui pengamatan penulis secara langsung di lapangan mengenai peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Takalar.

2. Wawancara

Adalah dimana penulis melakukan interview atau wawancara terhadap apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Takalar dalam mengendalikan inflasi. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai peran pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi yang ada di Kabupaten Takalar.

3. Studi kepustakaan (dokumen)

Adalah dokumen yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini tentang permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti meliputi data, seperti buku ilmiah dan laporan BPS (Badan Pusat Statistik).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai peran pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam mengendalikan inflasi dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam mengendalikan inflasi yang diterapkan dalam pengembangan berbentuk teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil penemuan baru yang sebelumnya sudah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai bagaimana peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Takalar.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara sangat penting dan mudah dalam menguji keabsahan hasil penelitian yaitu dengan melakukan triangulasi. Teknik pengumpulan data

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan dari berbagai cara pengumpulan data atau sumber data yang sudah ada. Triangulasi terbagi atas tiga yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat keabsahan terhadap informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan yang dikatakan umum dengan yang dilakukan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau koesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, memperoleh data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut terhadap sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih

segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data juga dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Takalar

1. Keadaan geografis

Secara geografis Kabupaten Takalar terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 40 km dari Kota Metropolitan Makassar dan terletak antara 5031 sampai 50381 Lintang Selatan dan antara 1990221 sampai 1990391 Bujur Timur dengan luas wilayah 566,51 Km², yang terdiri dari kawasan hutan seluas 8.254, Ha (14,57%), sawah seluas 16.436, 22 Ha (29,01%), perkebunan tebu PT. XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%), tambak seluas 4.233,20 Ha (7,47%), tegalan seluas 3.639,90 Ha (6,47%), kebun campuran seluas 8.932,11 Ha (15,77%), pekarangan seluas 1.929,90 Ha (3,41%) dan lain-lain seluas 7.892,22 Ha (13,93%).

Dengan batas wilayah Kabupaten Takalar sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan kota Makasar dan Kabupaten Gowa
- b. Sebelah Selatan dengan Laut Flores
- c. Sebelah Barat dengan Selat Makassar
- d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa

Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan masing-masing:

- 1) Kecamatan Manggarabombang
- 2) Kecamatan Mappakasunggu

- 3) Kecamatan Polombangkeng Selatan
- 4) Kecamatan Polombangkeng Utara
- 5) Kecamatan Galesong Selatan
- 6) Kecamatan Galesong Utara
- 7) Kecamatan Pattalassang
- 8) Kecamatan Galesong
- 9) Kecamatan Sanrobone

Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Makassar. Dimana Kota Makassar adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Bidang wilayah penyanggah bagi Kabupaten Takalar dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Takalar dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Makassar. Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis.

Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

2. Keadaan Topografi

Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan dan perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 m, dengan batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan rawa pantai, batu gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehan basal. Kabupaten Takalar dilewati oleh 4 buah sungai yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Jenetallasa, Sungai Pamakkulu dan Sungai Jenemarrung. Pada keempat sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha.

3. Wilayah administrasi Pemerintahan.

Kabupaten Takalar Kepulauan terdiri dari 10 kecamatan, 24 kelurahan dan 76 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,61 km² dan jumlah penduduk sebesar 286.390 jiwa dengan sebaran penduduk 505 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Takalar, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Kecamatan di Kabupaten Takalar

| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status |
|--------------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 73.05.09 | Galesong | - | 14 | Desa |
| 73.05.05 | Galesong selatan | - | 12 | Desa |
| 73.05.06 | Galesong utara | - | 9 | Desa |
| 73.05.07 | Kepulauan tanakeke | - | 5 | Desa |
| 73.05.01 | Mappakasunggu | 1 | 3 | Desa |
| 73.05.02 | Manggara bombing | 1 | 11 | Desa |
| 73.05.07 | Pattallassang | 9 | - | Desa |
| 73.05.03 | Polongbangkeng selatan | 6 | 4 | Desa |
| 73.05.04 | Polongbangkeng utara | 6 | 12 | Desa |
| 73.05.08 | Sanrobone | - | 6 | Desa |
| | Total | 24 | 76 | |

Sumber: Kantor Bupati Takalar dalam angka 2020.

Table di atas menunjukkan bahwa di kabupaten takalar berdasarkan data tahun 2020 memiliki 10 kecamatan dan di antaranya memiliki 24 kelurahan dan 76 desa.

4. Dinas dinas Daerah

Dinas daerah di pimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Organisasi dan tata kerja dinas di lingkup pemerintah kabupaten takalar

terdiri atas:

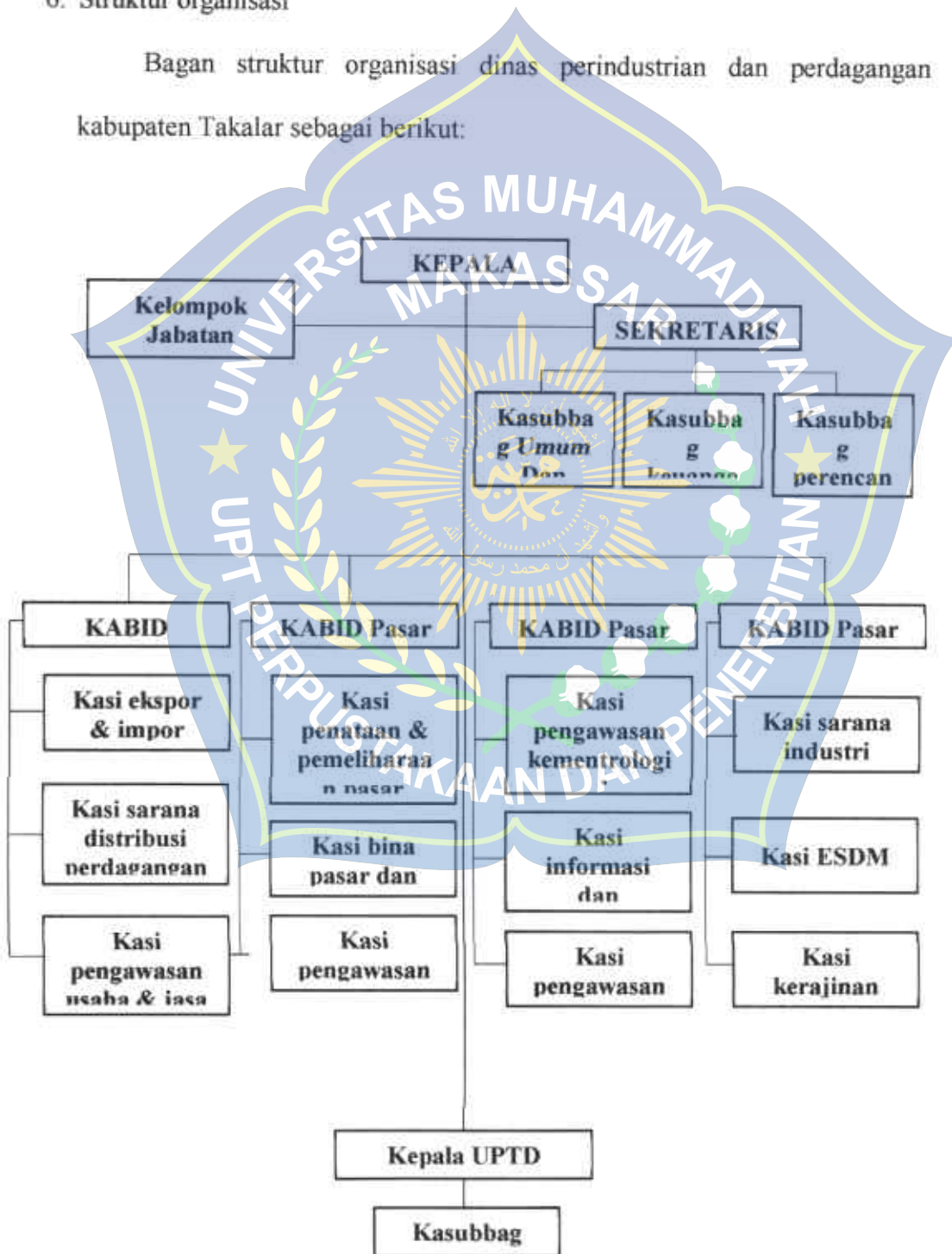
- a. Dinas pekerjaan umum.
 - b. Dinas pendapatan daerah.
 - c. Dinas sosial.
 - d. Dinas pertanian.
 - e. Dinas pengelolaan keuangan daerah.
 - f. Dinas Kesehatan.
 - g. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - h. Dinas lingkungan hidup dan pertanahan.
 - i. Dinas perpustakaan dan kearsipan.
 - j. Dinas Pendidikan nasional.
 - k. Dinas perindustrian dan perdagangan.
5. Sejarah singkat kantor dinas perindustrian dan perdagangan

Pembentukan kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar, merupakan realisasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). Sebagai tindak lanjut Peraturan daerah di Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001, Telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di Lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Takalar. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 141 Tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas di Lingkungan Pemerintahan. Selanjutnya untuk lebih jelasnya

tentang kedudukan, tugas, Fungsi dan susunan organisasi serta keadaan pegawai dapat dilihat pada uraian berikut ini.

6. Struktur organisasi

Bagan struktur organisasi dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Takalar sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Takalar

Keterangan struktur organisasi Dinas perindustrian dan perdagangan:

1. Kepala Dinas

mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur membina mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu
- c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas

- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan
 - e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat
 - f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan
 - h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas
 - i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas
 - j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas
 - k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan
 - l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
 - n. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
3. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
- mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan

laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

Melaksanakan urusan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan hukum;

- a. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. Menerima, membaca, mengagenda dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan surat;
- e. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- f. Melaksanakan pengendalian surat masuk sesuai dengan penataan kearsipan pola baru;
- g. Meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku;
- h. Mempersiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatannya;
- i. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor;
- j. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- k. Menginventarisasikan barang-barang / perlengkapan aset pemerintah;
- l. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

m. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor

4. Kepala sub bagian keuangan

Mempunyai tugas Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan, Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Kasubag Keuangan;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana kerja/kegiatan;
- c. Menyusun rancangan kebutuhan anggaran, perubahan, dan Laporan Keuangan BPKAD;
- d. Meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari bendahara BPKAD;
- e. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kebutuhan BPKAD;
- f. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan (SPJ) BPKAD;
- g. Mengoreksi, memaraf, dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan;
- h. Mengoreksi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan untuk mencapai hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Sub Bagian, dan para Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKAD serta dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala sub bagian keuangan;

- j. Membuat evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan acuan untuk perumusan kebijakan mendatang;
 - k. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan BPKAD;
 - l. Melaksanakan kegiatan pengadministrasian dan pembukuan anggaran belanja di lingkungan BPKAD;
 - m. Melaksanakan pembuatan dan penyusunan daftar gaji pegawai di lingkungan BPKAD;
 - n. Melaksanakan pemeriksaan laporan bulanan pengelolaan administrasi keuangan bendahara di lingkungan BPKAD;
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
5. Kepala sub bagian perencanaan program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- b. menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) dari masing-masing bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

- c. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam bidang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
- d. menghimpun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- e. menghimpun dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- f. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati dalam bidang Kearsipan dan Perpustakaan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati
- h. mengumpulkan bahan-bahan LKPI tahunan dan LKPI akhir masa jabatan Bupati pada bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- i. menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai pertanggungjawabana kepada Bupati;
- j. mengumpulkan, menyusun dan mengolah Laporan Evaluasi Rencana Kerja pertriwulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing bidang

- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya mencari alternatif pemecahannya
 - m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - o. membagi tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - p. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
 - q. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan kariernya
6. kepala bidang perdagangan
- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan.
- Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
- a. Penyusun kebijakan teknis bidang perdagangan.
 - b. Penyelenggaraan kebijakan admistrasi umum.
 - c. Pembinaan pengkoordinasi pengendalian pengawasan, program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktur dalam lingkup Bidang perdagangan.
 - d. Penyelenggara evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktur dalam lingkup Bidang perdagangan.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemimpin baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Kepala bidang pasar

Mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pengelolaan pasar;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi pejabat non struktural dalam lingkup bidang pengelolaan pasar
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Kepala Seksi ekspor dan impor

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri dalam lingkup ekspor impor.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup ekspor impor
 - b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup ekspor impor
 - c. Pelaksanaan kebijakan lingkup ekspor impor
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ekspor impor
 - e. Pelaksanaan administrasi lingkup ekspor impor
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Kepala seksi panataan pemeliharaan pasar rakyat dan tradisional
- Mempunyai tugas, merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pasar.
- Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan Pengembangan dan Penataan Pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - c. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan operasional dalam bidang Pengembangan dan Penataan Pasar
 - d. merencanakan kegiatan dan menyusun rencana penataan dan pengembangan pasar, pengadaan sarana, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
 - e. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan UKL/UPL dalam rangka pengembangan dan pembangunan dan pembinaan lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan dengan instansi terkait

f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan Kebersihan Pasar

g. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penjdapan bahan penyusiman kebijakan daerah urusan Kebersihan Pasar

10. Kasi pengawasan kementrologian dan perlindungan konsumen

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penyuluhan dan pengawasan kementrologian, pemberdayaan konsumen dan pengawasan peredaran barang dan jasa.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang
- b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang
- c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

11. Kasi sarana industri

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Sarana dan Prasarana industri

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan bidang sarana dan prasarana industri;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian bidang sarana dan prasarana industri;
 - c. Pelaksanaan pembinaan bidang bina industri yang meliputi bina usaha dan kelembagaan, sarana dan permodalan, serta standarisasi dan desain;
 - d. Peningkatan fasilitasi kerjasama, perijinan, pengembangan teknologi industri serta pengembangan sentra dan kawasan industri;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Kasi sarana distribusi perdagangan mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan koordinasi dan evaluasi terhadap alur distribusi, stok, pemantauan harga kebutuhan pokok serta barang strategis lainnya.
- Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
- a. Meyusun program kerja dan kegiatan seksi pengembangan usaha, sarana perdagangandan pemantauwandistribusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mengelola dan menganalisa data usaha dan sarana perdagangan
 - c. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pengembangan usaha / lembaga niaga dan sarana perdagangan
 - d. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan menggunakan produk dalam negeri
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan system informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sector perdagangan;

- f. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan evaluasi terhadap alur distribusi, stok, pemantauan harga kebutuhan pokok serta barang strategis lainnya;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya agen /distributor, perdagangan besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya;
- h. Memberi dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka operasi bahan pokok dan barang strategis lainnya
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- j. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- l. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pembangunan karir;
- m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

13. Kasi ESDM

Mempunyai tugas pokok melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unsur lingkup dinas, swasta, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengembangan dan pengawasan iklim usaha perdagangan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya

- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang iklim usaha dan ESDM
- c. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
- d. Mengkoordinir dan merencanakan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional maupun internasional bagi produk ekspor unggulan
- e. mengkoordinir dan merencanakan pelaksanaan pameran dan misi dagang lokal bagi produk ekspor unggulan
- f. mengkoordinir pelaksanaan pemberian informasi rencana penyelenggaraan pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media internet atau media lain
- g. Menganalisis informasi rencana penyelenggaraan pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media internet atau media lain
- h. Mengkoordinir dan merencanakan pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota)
- i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unsur lingkup dinas, swasta, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengembangan dan pengawasan iklim usaha perdagangan
- j. Mlaksanakan penyuluhan dan pemantauan terhadap iklim usaha perdagangan

- k. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dunia perdagangan
- l. Pelaksanaan perhitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah
- m. Pemberian rekomendasi permohonan penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas
- n. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga BBM/non BBM dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir
- o. Pembuatan rekomendasi permohonan lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas
- p. Pemrosesan permohonan izin lokasi pendirian dan pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar, izin Penyaluran Minyak Pelumas Bekas (MPB), izin pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di Daerah operasi daratan dan di Daerah operasi pada wilayah 1/3 dari kewenangan provinsi, dan izin Pendirian Depot Lokal.
- q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 dan Lindung Lingkungan di sektor migas
- r. Pengusulan pengadaan peralatan dan sarana guna menunjang kelancaran tugas di sektor migas
- s. Pembantuan proses pengusulan dalam rangka penetapan peraturan di bidang migas

- t. Pemberian persetujuan Surat Keterangan Terdaftar untuk Perusahaan Jasa Penunjang sektor migasembuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan
- v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Kasi sarana industri

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Sarana dan Prasarana industri.

Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan bidang sarana dan prasarana industri
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian bidang sarana dan prasarana industri
- c. Pelaksanaan pembinaan bidang bina industri yang meliputi bina usaha dan kelembagaan, sarana dan permodalan, serta standarisasi dan desain;
- d. Peningkatan fasilitasi kerjasama, perijinan, pengembangan teknologi industri serta pengembangan sentra dan kawasan industri;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan perdagangan

a. Visi

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan.

b. Misi

- 1) Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata,
- 2) Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan,
- 3) Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggungjawab, Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang industri dan perdagangan,
- 4) Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat,
- 5) Meningkatkan pembinaan dan Kerjasama dalam pengembangan Pasar distribusi promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen.

8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan

a. Tujuan

Misi Disperindag di implementasikan dalam bentuk jangka menengah. Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Pencapaian dilakukan dengan membuat skala prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan seluruh aktifitas

Disperindag Kabupaten Takalar. Adapun tujuan yang telah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan strategis lainnya bagi masyarakat.
- 2) Memperluas dan mendorong kesempatan berusaha serta Terwujudnya struktur industri dan perdagangan yang kuat sehingga mampu bersaing di pasar global (Global Market).
- 3) Terwujudnya pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan struktur industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- 4) Terciptanya SDM aparatur Disperindag Kabupaten Takalar yang profesional dan tersedianya tenaga pembina/instruktur pelaku usaha industri dan perdagangan yang menguasai IPTEK.
- 5) Terwujudnya pusat informasi dan meningkatkan kerja sama industri dan perdagangan baik lokal, regional, maupun nasional.

b. Sasaran

Sasaran jangka menengah Disperindag Kabupaten Takalar menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang. Sasaran merupakan target kualitatif dari Disperindag Kabupaten Takalar sehingga pencapaian target dijadikan sebagai ukuran kinerja yang sifatnya lebih konkrit dan riil daripada tujuan. Sasaran Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru antara lain:

- 1) Meningkatkan perlindungan hak konsumen sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
- 2) Meningkatkan pembinaan industri dengan memperhatikan ramah lingkungan
- 3) Meningkatkan mutu melalui sistem permodalan, kemitraan dan peningkatan IPTEK pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.
- 4) Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha bidang industry dan perdagangan.
- 5) Menyediakan informasi pasar kepada pelaku usaha industri dan perdagangan dan meningkatnya kerja sama industri dan perdagangan dalam dan luar negeri dalam rangka memperluas akses pasar.

B. Hasil penelitian pengendalian inflasi di Kabupaten Takalar

Peranan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengendalikan inflasi yang berasal dari harga barang pangan sangat besar karena daerah berkontribusi 77% dalam catatan inflasi nasional. pemerintah daerah punya peranan penting dan strategis dalam memperkuat perekonomian, bukan saja dalam ketahanan pangan tapi mendorong inflasi turun.

pesatnya peningkatan jumlah TPID yang terbentuk menunjukkan besarnya perhatian, kesadaran, kepedulian dan komitmen para Kepala Daerah terhadap pentingnya mewujudkan stabilitas harga di daerah. Mengingat peranannya yang sangat strategis, TPI dan TPID ini perlu terus diperkuat dalam aspek kelembagaan maupun koordinasinya dan menjadi semakin penting mengingat peranan inflasi daerah terhadap pembentukan inflasi nasional yang cukup besar.

Di samping itu, mengingat penyumbang inflasi di tiap daerah cukup unik maka perlu penanganan yang khusus disesuaikan dengan kondisi kedaerahan masing-masing. Agar fungsinya lebih nyata, TPI dan TPID tidak lagi cukup hanya sebagai wadah pertukaran informasi, namun perlu diarahkan untuk mempertajam implementasi berbagai program kerja yang difokuskan pada peningkatan sisi pasokan. Terutama komoditas pangan, melalui perbaikan produksi, distribusi, organisasi industri, dan struktur pasar, termasuk pengaturan tata niaga.

Berikut ini data mengenai inflasi selama dua tahun penuh dari bulan Januari 2019 hingga pada bulan Desember tahun 2020.

Tabel 3.
Tingkat inflasi kabupaten takalar pada tahun 2019 dan 2020

| Bulan Dan Tahun | Tingkat | Bulan Dan Tahun | Tingkat |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Januari 2019 | 3,49% | Januari 2020 | 3,25% |
| Februari 2019 | 3,83% | Februari 2020 | 3,18% |
| Maret 2019 | 3,61% | Maret 2020 | 3,40% |
| April 2019 | 4,17% | April 2020 | 3,41% |
| Mei 2019 | 4,33% | Mei 2020 | 3,23% |
| Juni 2019 | 4,37% | Juni 2020 | 3,12% |
| Juli 2019 | 3,88% | Juli 2020 | 3,18% |
| Agustus 2019 | 3,82% | Agustus 2020 | 3,20% |
| September 2019 | 3,72% | September 2020 | 2,88% |
| Oktober 2019 | 3,58% | Oktober 2020 | 3,16% |
| November 2019 | 3,30% | November 2020 | 3,23% |
| Desember 2019 | 3,61% | Desember 2020 | 3,13% |

Sumber: BPS kabupaten takalar

Pada awal tahun 2019, tepatnya bulan Januari tingkat inflasi diawali dengan persentase yang tidak terlalu tinggi yakni 3,49%. Kemudian mengalami kenaikan pada bulan Februari menjadi 3,83%. Dan kemudian mengalami kenaikan di bulan Maret. Hingga pada bulan April mengalami kenaikan yang cukup tinggi selama tiga bulan berturut-turut, lalu di bulan Juli persentasenya mengalami turun naik sampai dengan akhir tahun 2019. Kenaikan inflasi pada titik paling tinggi terjadi pada bulan Juni yakni 4,37%. Sedangkan titik yang paling rendah di tahun 2019 ada di tahun November yakni 3,30%.

Pada tahun 2020, persentase inflasi terbilang rendah dan stabil, berbeda pada tahun sebelumnya yang tingkat inflasinya yang tinggi dan cenderung naik turun. Tingkat inflasi paling tinggi berada di bulan April yakni 3,41%. Kemudian yang paling rendah di tahun 2020 ada di bulan September yakni 2,88%.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tolak ukur kebijakan peranan pemerintah daerah dalam mengendalikan Inflasi di Kabupaten Takalar dengan melihat tiga indikator (Yusuf, 2014) yakni (1) *regulator*, (2) *fasilitator*, dan (3) *motivator*. Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut diuraikan secara berikut:

1. Regulator

Regulator adalah Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merumuskan aturan-aturan atau kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian inflasi. Pengendalian yang memerlukan dukungan regulasi

yang baik pula. Hubungan antara regulasi dengan pengendalian adalah dalam mengendalikan inflasi perlu adanya regulasi agar baik.

Regulasi adalah suatu peraturan yang di buat untuk menegendalikan suatu kelompok, Lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan Bersama, bermasyarakat, dan bersosialisai. Contoh indikator *regulator*: adanya PERDA yang mengatur tentang pengendalian inflasi.

Berdasarkan indikator di atas peneliti kemudian mewawancarai kepala sub bagian perekonomian secretariat daerah kabupaten takalar, mengatakan: “Untuk mengendalikan inflasi di kabupaten takalar kami mengacu kepada regulasi sesuai SK bupati takalar NO. 395/Thn 2020 tentang pengendalian inflasi” (Hasil wawancara HM Senin 1 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator regulator dapat di pahami bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dengan adanya SK Bupati tersebut agar kiranya inflasi dapat di kendalikan di kabupaten takalar.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan, mengatakan:

“kami telah menjalankan kebijakan yg telah di tetapkan untuk memperkuat logistik, kemudian melakukan koordinasi dengan tim pengendali provinsi dan pusat untuk mendapatkan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan jasa.”

(Hasil wawancara BS Kamis 28 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator regulator dapat dipahami bahwa pada pelaksanaan kebijakan tersebut pemerintah telah melakukan beberapa Tindakan dalam upaya

memperkuat logistik dan mealukan koordinasi untuk mengetahui harga barang dan jasa yang ada di pasaran.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator regulator dapat di pahami bahwa dalam pengendalian inflasi di Kapupaten Takalar, Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah mengeluarkan regulasi sesuai SK Bupati Takalar NO. 395/Thn 2020. Persoalan dalam menjalankan kebijakan tersebut, dari pihak pemerintah daerah telah melakukan berbagai Tindakan seperti, melakukan upaya untuk memperkuat logistik, melakukan koordinasi dengan tim pengendali inflasi provinsi dan pusat dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian, dan melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan jasa.

2. Fasilitator

Fasilitator, adalah suatu tindakan agar mampu memunculkan pengetahuan dan gagasan yang difasilitasi. Esensi memfasilitasi ialah memperlengkapi dan memampukan orang lain atau kelompok yang difasilitasi untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Contoh indikator

Fasilitator: menyediakan sembako murah.

Berdasarkan indikator di atas peneliti kemudian mewawancarai Kepala Sub Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, mengatakan:

“kami telah memfasilitasi terutama kepada masyarakat yang kurang mampu berupa penjualan sembako murah, agar dapat membantu kebutuhan sehari hari terhadap barang yang di beli”. (hasil wawancara HM senin 1 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator fasilitator dapat di pahami bahwa tujuan pemerintah dalam memberikan fasilitas seperti harga sembako murah agar daya saing beli masyarakat terhadap kebutuhan mampu terpenuhi terkhusus bagi masyarakat yang kurang mampu.

Selanjutnya hasil wawancara Sekretaris Dinas Perdagangan, mengatakan:

“Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih karna dengan adanya sembako murah ini sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu, cuman ada beberapa orang yang belum mendapatkan padahal kalau di liat dari kondisi ekonominya mereka juga berhak mendapat sembako murah ini”. (Hasil wawancara RM Selasa 2 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator fasilitator dapat di pahami bahwa pengadaan sembako murah yang di berikan oleh pemerintah belum berjalan maksimal sebagaimana masih ada beberapa masyarakat yang seharusnya dapat namun nyatanya yang ada di lapangan belum merasakan yang namanya sembako murah tersebut.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator *Fasilitator* ini bahwa fasilitas yang telah di sediakan oleh pemerintah ini sudah sangat membantu namun, dalam pelaksanaannya masih belum cukup maksimal di karenakan masih ada beberapa yang belum mendapatkan sembako murah tersebut padahal mereka juga tergolong masyarakat yang kurang mampu. Untuk kedepannya perlu adanya pengawasan lebih dari pihak terkait agar penyaluran sembako murah ini tepat saran.

3. Motivator

Motivator, adalah profesi penggerak partisipasi yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Pemberian motivasi ini biasanya melalui seminar dan pelatihan.

Berdasarkan indikator di atas peneliti kemudian mewawancarai selaku Sekretaris Dinas perdagangan, mengatakan:

"Cara kami agar stakeholder bisa termotivasi yaitu kami memberikan beberapa penghargaan yang berupa piagam dan dana insentif khususnya kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah agar dapat memberi semangat dalam melaksanakan tugas, dan terus memantau terkait dari tugas TPID itu sendiri" (hasil wawancara MS senin 1 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator Motivator dapat di pahami bahwa dalam pemberian motivasi ada beberapa langkah yang telah di tempuh oleh pemerintah daerah kabupaten takalar diantaranya memberikan piagam dan dana intensif bagi para stakeholder dan TPID Kabupaten takalar agar mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Sub Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, mengatakan bahwa;

"kami telah mngusahakan untuk menggerakkan partisipasi bagi para pelaku ekonomi jika terjadi kendala kendala dalam proses pengendalian perekonomian di Kabupaten takalar dengan melakukan bimbingan dan pelatihan, terkhusus kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan orientasi dalam hal mengendalikan inflasi yang ada di kabupaten takalar". (hasil wawancara HM Senin 1 Januari 2021).

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator Motivator ini bahwa dalam proses pemberian motivasi kepada para pelaku

ekonomi pemerintah daerah mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk memberikan orientasi tugas kepada TPID dalam hal pengendalian inflasi, dan pemerintah siap memberikan penghargaan berupa pemberian piagam dan dana insentif yang tujuannya agar dapat memberi semangat dalam melaksanakan tugas, dan terus memantau terkait tugasnya masing masing.

C. Pembahasan

Peran pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di kabupaten takalar dilihat dari beberapa indikator, dilihat dari tiga indikator (Yusuf.2014) yakni (1) *Regulator*, (2) *Fasilitator*, (3) *Motivator*. Adapun pembahasa secara rinci mengenai hal tersebut di uraikan sebagai berikut:

1. *Regulator*

Sebagai *Regulator* Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah mengeluarkan regulasi sesuai SK Bupati Takalar NO. 395/Thn 2020. Persoalan dalam menjalankan kebijakan tersebut, dari pihak pemerintah daerah telah melakukan berbagai Tindakan dalam perumusan kebijakan tersebut seperti, melakukan upaya untuk memperkuat logistik, melakukan koordinasi dengan tim pengendali inflasi provinsi dan pusat dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian, dan melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan jasa.

2. *Fasilitator*

Sebagai Fasilitator, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat berupa harga sembako murah dan ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu namun, dalam pelaksanaannya masih belum cukup maksimal di karenakan masih ada beberapa yang belum mendapatkan sembako murah tersebut padahal mereka juga tergolong masyarakat yang kurang mampu. Untuk kedepannya perlu adanya pengawasan lebih dari pihak terkait agar penyaluran sembako murah ini tepat saran.

3. *Motivator*

Proses pemberian motivasi kepada para pelaku ekonomi pemerintah daerah mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk memberikan orientasi tugas kepada TPID dalam hal pengendalian inflasi, dan pemerintah siap memberikan penghargaan berupa pemberian piagam dan dana insentif yang tujuannya agar dapat memberi semangat dalam melaksanakan tugas, dan terus memantau terkait tugasnya masing masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai peran pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di kabupaten takalar di tarik kesimpulan sebagai berikut:

a. *Regulator*

Sebagai Regulator Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah mengeluarkan regulasi sesuai SK Bupati Takalar NO. 395/Thn 2020. Persoalan dalam menjalankan kebijakan tersebut, dari pihak pemerintah daerah telah melakukan berbagai Tindakan dalam perumusan kebijakan tersebut seperti melakukan upaya untuk memperkuat logistik, melakukan koordinasi dengan tim pengendali inflasi provinsi dan pusat dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian, dan melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan jasa.

b. *Fasilitator*

Sebagai Fasilitator, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat berupa harga sembako murah dan ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu namun, dalam pelaksanaannya masih belum cukup maksimal di karenakan masih ada beberapa yang belum mendapatkan sembako murah tersebut padahal mereka juga tergolong masyarakat yang kurang mampu.

Untuk kedepannya perlu adanya pengawasan lebih dari pihak terkait agar penyaluran sembako murah ini tepat sasaran.

c. *Motivator*

Proses pemberian motivasi kepada para pelaku ekonomi pemerintah daerah mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk memberikan orientasi tugas kepada TPID dalam hal pengendalian inflasi, dan pemerintah siap memberikan penghargaan berupa pemberian piagam dan dana insentif yang tujuannya agar dapat memberi semangat dalam melaksanakan tugas, dan terus memantau terkait tugasnya masing masing.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang dihasilkan penelitian mendatang di harapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

- a. Sebaiknya dalam melaksanakan kebijakan seharusnya sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan agar dalam mengendalikan harga barang dan jasa dapat menekan kenaikan harganya.
- b. Seharusnya dalam memfasilitasi masyarakat yang daya belinya berada pada tingkat yang rendah perlu adanya pengawasan dalam menyalurkan sembako murah tersebut agar tepat sasaran.
- c. Stakeholder dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Takalar seharusnya lebih meningkatkan kerja samanya agar dalam menjalankan tugasnya dapat maksimal.

- d. Pemerintah sebaiknya lebih sering mengadakan pelatihan dan bimbingan orientasi kepada para pelaku ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Anastavia, Ayu. 2018. *Pengaruh Inflasi Terhadap Kestabilan Dan Eksistensi Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus Usaha Keripik Pisang Tunas Kota Metro)*. Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO.
- Arsyad. 2019. *Konsep Peran*. Makassar: Humas Sekda.
- Boediono. 2012. *Ekonomi Moneter Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Fitria, Meda. 2018. *Manajemen Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Tpid) Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Mengendalikan Inflasi Di Kota Palangka Raya*. Istitut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah.
- Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, Zakka. 2018. *Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (Opm) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Perindag Diy)*. Universitas Islam Indonesia, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.
- KBBI. 2012. *Definisi Peran*. Jakarta: PT Indonesia
- Kepres No. 23 Thn. 2017. *Tentang Pengendalian Infalsi*.
- Latumaerissa, Julius. R, 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mintzberg, Siswanto. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- N. Gregory, Mankiw, et.all. 2012. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prathama. 2012. *Pengantar ilmu ekonomi "edisi ketiga"*. Jakarta, Lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas indonesi.
- Ratminto & Winasrih. S. Atik. 2012. *Sosiologi (Konsep dan Teori)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto. 2011. *Perekonomian di Masa Inflasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, Mifta. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tribuntimur. 2018. *Ekspektasi Inflasi*. Diakses tanggal 12 April 2020. <http://www.Tribuntimur.2018/05/ekpektasi-inflasi.html>.
- Wulansari, Dewi. 2012. *Sosiologi (Konsep dan Teori)*. Bandung: PT. Refika.
- Yusuf, Iyas. 2014. *Peran dan Fungsi Pemerintahan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. Diakses tanggal 10 November 2019. <http://www.iyasyusuf.asia/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html>.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Sesi wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perekonomian



Sesi wawancara dengan Sekretaris Dinas Perdagangan Kab. Takalar



Halaman depan Kantor Dinas Perdagangan kabupaten Takalar

RIWAYAT HIDUP



SUARDI ACHMAD Lahir pada tanggal 23 April 1993 di Dusun Beba desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Anak Ke tiga dari buah kasih dari pasangan Achmad dan Rukiah. Penulis menempuh Pendidikan Dasar di SDN Beba dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Abnaul Amir dan tamat pada tahun 2008. Setelah tamat, penulis kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Galesong Utara dan tamat pada tahun 2012. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa pada tahun 2013 penulis berhasil lulus di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1). Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa menimba ilmu yang merupakan bekal dimasa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara. Dan di tahun 2020 penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Inflasi Di Kabupaten Takalar”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) .